

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016-2018 : IMAJINER ATAU REALITA ?

Tedi Setiawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

e-mail: teddy.setiawan2008@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Kota Pekanbaru seperti kenapa realisasi anggaran Kota Pekanbaru tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan selama tahun 2016- 2018 dan untuk mengetahui apakah pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan rasio keuangan dalam mengambil keputusan dan rencana masa depan untuk Kota Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah BPKAD Kota Pekanbaru dan Informan Penelitian ini adalah kebid anggaran (R1) dan kabid akuntansi dan pelaporan (R2). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini dianalisa menggunakan *interactive model analysis*. Metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan menggunakan Rasio kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio efisiensi, Rasio pertumbuhan dan Rasio keserasian. Berdasarkan hasil penelitian, rasiokemandirian dinilai cukup efektif. Rasio efektifitas dinilai cukup efektif. Rasio efisiensi dinilai kurang efisien mengelola keuangan dengan *trend* rasio hampir 100 persen. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan positif. Rasio aktifitas belanja operasi Kota Pekanbaru menggambarkan bahwa pemerintah lebih fokus terhadap belanja rutin seperti belanja pegawai, barang dan jasa. Penyebab tidak tercapainya realisasi anggaran Kota Pekanbaru adalah seperti PMK yang terlambat terbit. Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dibagian pajak daerah dan retribusi daerah menjadi kategori yang paling besar tidak mencapai realisasi dan diakui oleh pemerintah Kota Pekanbaru dikarenakan OPD yang bertugas memungut pajak dan retribusi tidak maksimal. Dan pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan dan digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dan rencana masa depan Kota Pekanbaru

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Realisasi Anggaran.

Abstract

This study aims to assess the financial performance of Pekanbaru City, such as why the realization of the Pekanbaru City budget has never reached the target set during 2016-2018 and to find out whether the Pekanbaru City government uses financial ratios in making decisions and future plans for Pekanbaru City. The subjects of this study were BPKAD Pekanbaru City and the informants of this study were the chief budget officer (R1) and the head of accounting and reporting(R2). The type of data used in this research is descriptive qualitative data. The data sources used are primary data and secondary data. The data in this study were analyzed using interactive model analysis. The method used in analyzing financial performance uses independence ratios, local revenue effectiveness ratios, efficiency ratios, growth ratios and compatibility ratios. Based on the research results, the independence ratio is considered quite effective. The effectiveness ratio is

considered quite effective. The efficiency ratio is considered less efficient in managing finances with a trend ratio of almost 100 percent. The ratio of growth in local revenue (PAD) is categorized as positive. The ratio of activities to operating expenditures in Pekanbaru City illustrates that the government is more focused on routine expenditures such as spending on personnel, goods and services. The cause of not achieving the realization of the Pekanbaru City budget is like the PMK being issued late. The level of realization of regional original revenue (PAD), especially in the regional taxes and levies, is the largest category that does not reach realization and is recognized by the Pekanbaru City government because OPD in charge of collecting taxes and levies is not optimal. And the government of Pekanbaru City uses financial ratios in assessing financial performance and is used as a tool for making decisions and plans for the future of Pekanbaru City.

Keywords : Financial Performance, Financial Ratios, Budget Realization

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan Pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran dan Juga merupakan suatu potensi yang dapat digunakan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dapat menunjang sistem pemerintahan.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu pemerintahan daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya sesuai peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan Masyarakat, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2016-2018 sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
2016	Pendapatan daerah	2.497.172.818.914	2.089.873.332.568	83,69%
	Belanja	2.425.866.099.699	2.025.563.454.217	83,50%
2017	Pendapatan daerah	2.631.568.579.911	2.171.590.365.093	82,52%
	Belanja	2.629.290.035.710	2.152.172.723.978	81,85%
2018	Pendapatan daerah	2.643.040.520.873	2.235.018.502.739	84,56%
	Belanja	2.639.311.006.654	2.220.359.504.220	84,13%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 2016-2018

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa target realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2016-2018 Masih dibawah 84,56%, artinya dari tahun 2016-2018 tidak pernah mencapai target yang diharapkan setiap tahunnya. Hal ini membuat pertanyaan banyak pihak tentang kinerja pemerintah Kota Pekanbaru selama ini. Padahal jika

dilihat dari pendapatan daerah Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan yang di harapkan atau belum mencapai target.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai permasalahan di atas maka untuk itu perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut agar menjadi lebih baik maka diperlukannya pengukuran kinerja. Menurut (Halim, 2012) salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim, 2012). (Mardiasmo, 2007)

Pelaporan realisasi anggaran yang selama ini dilaporkan oleh organisasi pemerintah cenderung sebatas imajiner atau angan-angan semata, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih komprehensif terkait dengan permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah serta mengeksplorasi secara kualitatif apa yang terjadi sesungguhnya terkait dengan kinerja pemerintah Kota Pekanbaru. Terlebih lagi, penelitian ini penting karena mengeksplorasi secara lebih mendalam dua pertanyaan kualitatif berikut : (1) apakah pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan rasio keuangan untuk membantu pengambilan keputusan dan rencana untuk kinerja keuangan dimasa mendatang ? (2) apa yang menyebabkan realisasi anggaran pemerintah Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir tidak pernah mencapai target ?

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang di inginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). (Lupia, A; Mccubins, 2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Halim, A; Abdullah, 2010)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah, ditunjukkan melalui besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari sumber lain misalnya; bantuan pemerintah pusat/provinsi maupun dari pinjaman daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (pemerintah pusat/provinsi). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2. Kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah

Persentase PAD	Kriteria
00,00 – 10,00	Sangat kurang
10,00 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2014) dalam Hery (2019)

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Mahmudi, 2010) dalam penelitian (Agrari Petompo, D, Untu, 2019), rasio efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau yang dianggarkan sebelumnya.

Tabel 3. Kriteria penilaian efektifitas keuangan daerah

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Dalam Susanto (2014) dalam Hery (2019)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut (Halim, 2007) rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan

efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin membaik.

Tabel 4. Kriteria kinerja pengelolaan keuangan daerah

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2014) dalam Hery (2019)

Rasio Pertumbuhan

Menurut (Mahmudi, 2010) rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2012)

Rasio Kerasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

1. Rasio belanja operasi

$$\text{Rasio belanja operasi} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja operasi}} \times 100\%$$

2. Rasio belanja modal

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

Tidak baik = 0% - 50%

Baik = 50% - 100%

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teori dan penelitian sebelumnya maka muncul dua pertanyaan penelitian tentang penyebab realisasi anggaran Pemko Pekanbaru tidak mencapai target dan Informasi tentang Kinerja keuangan untuk pengambilan keputusan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian merupakan tempat variable melekat. Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variable penelitian diperoleh (Arikunto, 2014). Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah BPKAD Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan kepala pengelola keuangan bpkad Kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa dokumentasi yaitu laporan realisasi anggaran Kota Pekanbaru tahun 2016-2018 yang langsung diperoleh dari bpkad Kota Pekanbaru. Data dalam penelitian ini dianalisa menggunakan *interactive model analysis* dari (Miles & Hubberman, 1994) yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisa data dengan beberapa bagian yaitu, pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

Dalam pembahasan penelitian mengenai kinerja keuangan Kota Pekanbaru, data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran Kota Pekanbaru dari tahun 2016-2018 menggunakan lima rasio, yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio keserasian.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Susanto, 2019). Dibawah ini merupakan perhitungan rasio kemandirian pengelolaan keuangan Kota Pekanbaru tahun 2016-2018:

Tabel 5 Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota Pekanbaru Ta 2016-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah	Hasil rasio kemandirian	Kriteria
2016	482.031.164.819	1.607.842.168.298	29,90%	Sedang
2017	697.466.656.720	1.474.123.708.373	47,30%	Baik
2018	592.707.161.812	1.642.311.340.927	36,08%	Cukup

Sumber data : Data diolah (2020)

Pada tabel 5, dapat dilihat bahwa pertahun 2016, tingkat rasio kemandirian dinilai sedang dalam kemandirian pengelolaan keuangan,. Sementara pada tahun 2017 rasio kemandirian sebesar naik menjadi kategorikan baik, yang artinya Kota Pekanbaru mampu meningkatkan rasio kemandirian dari tahun sebelumnya secara signifikan. Namun, pada tahun 2018 turun kembali dan kemudian dikategorikan cukup . Rata-rata kemandirian pengelolaan keuangan Kota Pekanbaru tahun 2016-2018 mencapai 37.76% yang berada pada kategori cukup mandiri. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun 2016-2018 lebih kecil dibandingkan bantuan pemerintah pusat atau dana transfer, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Pekanbaru masih bergantung kepada pendapatan dari pemerintah pusat akan memiliki kinerja yang rendah

Rasio Efektifitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Susanto, 2019). Kemampuan suatu daerah diukur jika rasio rasio

efektifitas mencapai minimal satu atau 100 persen. Berdasarkan kriteria diatas, maka berikut merupakan perhitungan rasio efektifitas Kota Pekanbaru tahun 2016-2018 :

Tabel 6. Efektifitas pengelolaan keuangan Kota Pekanbaru ta 2016-2018

Tahun	Realisasi penerimaan	Target penerimaan	Hasil/rasio efektifitas	Kriteria
2016	2.089.873.332.568	2.497.172.818.914	83,68%	Cukup
2017	2.171.590.365.093	2.631.568.579.911	82,52%	Cukup
2018	2.235.018.502.739	2.643.040.520.873	84,56%	Cukup

Sumber data : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 6,pada tahun 2016 rasio efektifitas cukup efektif. Kemudian pada tahun 2017 rasio efektifitas menurun namun masih dalam kategori cukup efektif. Dan pada tahun 2018 rasio efektifitas kembali meningkatdan masih dikategorikan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio efektifitas Kota Pekanbaru berada dalam kriteria cukup efektif pada rentang 80%-90%. Perkembangan rasio efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Pekanbaru tahun 2016-2018 dengan rata-rata rasio sebesar 83.59% selama kurun waktu 3 tahun dimana realisasi penerimaan lebih kecil dari target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Mengacu pada laporan apbd tahun 2016-2018. Realisasi meningkat namun masih jauh dari target yang diharapkan. Dan harus dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Khusus pendapatan hasil pajak daerah dan retribusi daerah, pemungutan pajak harus dioptimalisasi sehingga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima (Susanto, 2019). Kinerja keuangan Kota Pekanbaru dikatakan efektif apabila rasio dibawah 100 persen. Semakin kecil angka rasio efektifitas, maka semakin efisien kinerja keuangan daerah tersebut. Dibawah ini merupakan perhitungan rasio efisiensi pengelolaan keuangan Kota Pekanbaru tahun 2016-2018:

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Kota Pekanbaru TA 2016-2018

Tahun	Belanja	Realisasi penerimaan	Hasil/rasio efisiensi	Kriteria
2016	2.025.563.454.217	2.089.873.332.568	96,92%	Kurang
2017	2.152.172.723.978	2.171.590.365.093	99,10%	Kurang
2018	2.220.359.504.220	2.235.018.502.739	100.66%	Tidak efisien

Sumber data : Data diolah (2020)

Menurut tabel 7, realisasi belanja daerah Kota Pekanbaru mengalami kenaikan setiap tahunnya, begitu juga dengan realisasi penerimaan atau pendapatan Kota Pekanbaru juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan begitu, rasio efisiensi turut mengalami kenaikan pula. Rasio efisiensi tahun 2016 dikategorikan kurang efisien karena berada pada angka 96,92% yang berada dibawah rasio 100%. Tahun 2017 rasio naik namun masih dikategorikan kurang efisien karena berada di angka 99,10% yang berada di bawah rasio 100%. Kemudian, pada tahun 2018rasio efisiensi naik kembali dari tahun sebelumnya dan dikategorikan tidak efisien karena telah melewati 100 persen.

Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata rasio efisiensi selama tahun 2016-2019 sebesar 98.89 persen dan pemerintah Kota Pekanbaru dianggap kurang efisien dalam mengelola keuangan dengan *trend* rasio hampir 100 persen. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana pemerintah Kota

Pekanbaru kurang efisien dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penghematan anggaran baiknya dilakukan pertimbangan agar mewujudkan kinerja keuangan yang sesuai dengan prinsip *value of money*.

Rasio Pertumbuhan

Pengukuran rasio pertumbuhan bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tahun berikutnya (Susanto, 2019). Dengan menggunakan perhitungan rasio ini, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memahami bagaimana pertumbuhan komponen pendapatan dan pengeluaran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap potensi yang ada dalam membangun Kota Pekanbaru.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dibawah ini merupakan perhitungan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah keuangan Kota Pekanbaru tahun 2016-2018:

Tabel 8. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun	PAD tahun sekarang	PAD tahun sebelumnya	Pertumbuhan
			PAD
2016	482,031,164,869	492,511,317,377	-2,13%
2017	697,466,656,720	482,031,164,869	44,69%
2018	592,707,161,812	697,466,656,720	-15,02%

Sumber data : Data Diolah (2020)

Pada tabel 8, rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 dan 2018 negatif dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sekarang lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Tahun 2017 pemerintah Kota Pekanbaru berhasil menaikkan sebesar 44,69% dari tahun 2016. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3.45% .Dapat dikatakan, semakin besar pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan keberhasilan setiap periode. Namun pada kenyataanya, Pemerintah Kota Pekanbaru belum bisa memaksimalkan kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan atau peningkatkan yang telah dicapai. Hal ini harus menjadi koreksi bagi Pemerintah agar bisa mempertahankan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terkhusus di komponen penerimaan hasil pajak dan retribusi. Karena komponen tersebut merupakan sumber penerimaan terbesar pendapatan asli Kota Pekanbaru.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Dibawah ini merupakan perhitungan rasio pertumbuhan Pendapatan Daerah keuangan Kota Pekanbaru tahun 2016-2018:

Tabel 9. Perhitungan rasio Petumbuhan Pendapatan daerah

Tahun	Pendapatan tahun sekarang	Pendapatan tahun sebelumnya	Pertumbuhan Pendapatan
2016	2,089,873,332,568	2,063,360,103,318	1,08%
2017	2,171,590,365,093	2,089,873,332,568	3,91%
2018	2,235,018,502,739	2,171,590,365,093	2,92%

Sumber : Data diolah (2020)

Kemudian, pada realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2018 mengalami kenaikan secara bertahap setiap tahunnya dan tidak terjadi penurunan pendapatan daerah. Pada tahun 2017 rasio pertumbuhan pendapatan daerah naik dan turun pada tahun 2018. Namun, meski turun pada tahun 2018, angka realisasi tetap bertambah dibanding dengan tahun sebelumnya. Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan daerah adalah sebesar 2.64 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mempertahankan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah.

Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

Dibawah ini merupakan perhitungan rasio pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kota Pekanbaru tahun 2016-2018:

Tabel 10. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

Tahun	Belanja tidak langsung tahun sekarang	Belanja tidak langsung tahun sebelumnya	Pertumbuhan Belanja Tidak langsung
2016	1,025,536,764,438	1,011,542,044,588	1,38%
2017	935,717,012,074	1,025,536,764,438	-8,75%
2018	916,732,816,552	935,717,012,074	-2,02%

Sumber : Data diolah (2020)

Sementara pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016 hingga menyentuh angka rasio negatif. Rasio negatif dihasilkan dari realisasi belanja tahun 2017 lebih kecil dibanding realisasi belanja tidak langsung tahun sebelumnya, yang artinya pengeluaran pada seluruh komponen belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja kebutuhan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan partai politik menurun dibanding tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018, rasio pertumbuhan belanja tidak langsung kembali naik.

Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung

Dibawah ini merupakan perhitungan rasio pertumbuhan Belanja Langsung Kota Pekanbaru tahun 2016-2018:

Tabel 11. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung

Tahun	Belanja langsung tahun sekarang	Belanja langsung tahun sebelumnya	Pertumbuhan Belanja langsung
2016	1,000,026,689,779	1,524,801,568,417	-34,42%
2017	1,216,455,711,904	1,000,026,689,779	21,64%
2018	1,303,626,687,668	1,216,455,711,904	7,16%

Sumber : Data diolah (2020)

Sedangkan pada rasio pertumbuhan belanja langsung, yang awalnya pada tahun 2016 mengalami rasio negatif, kemudian pada tahun 2017 rasio pertumbuhan belanja langsung kembali naik namun turun kembali pada tahun 2018. Realisasi belanja langsung dari tahun 2016-2018 selalu mengalami kenaikan angka realisasi dan angka realisasi tersebut lebih besar daripada realisasi belanja tidak langsung kecuali ditahun 2016. Artinya, pemerintah Kota Pekanbaru lebih fokus terhadap penganggaran program kerja sesuai dengan misi SKPD.

Rasio Kesperasian

Rasio ini menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan secara proporsional (Susanto, 2019). Semakin tinggi persentase rasio aktifitas belanja rutin maka semakin rendah belanja modal. Berikut cara mencari rasio belanja operasi (belanja rutin) dan belanja modal (belanja investasi):

Tabel 12. Aktivitas pengelolaan keuangan Kota Pekanbaru tahun 2016-2018

Tahun	Total Belanja Daerah	Belanja		Rasio	
		Operasi	Modal	Operasi	Modal
2016	2.025.563.454.217	1.573.935.577.763	451.627.876.454	77,7%	22,3%
2017	2.152.172.723.977	1.685.449.641.171	466.723.082.806	78,3%	21,7%
2018	2.220.359.504.220	1.689.047.575.603	531.311.928.617	76,1%	23,9%

Sumber data : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 12, Pada tahun 2016-2018 , rasio belanja operasi atau belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja investasi atau belanja modal. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru cenderung lebih memprioritaskan belanja rutin dibanding belanja investasi atau modal yang dapat digunakan sebagai dana pembangunan sarana dan prasarana dibidang ekonomi maupun sosial seperti layanan bagi publik. Berkurangnya porsi belanja modal yang diharapkan atau ditargetkan dapat menghambat pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, kemajuan Kota Pekanbaru dan diharapkan menjadi daerah yang mandiri sehingga mampu membangun infrastruktur yang dirasakan dan menguntungkan bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Hal tersebut konsisten dengan penelitian dari (Fajri, 2016)

Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru Selama Tiga Tahun Terakhir

Dengan mencocokkan temuan peneliti dengan hasil wawancara bersama R1 selaku kepala bagian anggaran BPKAD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam proses awal penyusunan

anggaran memang sudah terjadi kendala seperti PMK yang diterbitkan terlambat dan tidak sejalan dengan proses penyusunan anggaran Kota Pekanbaru. Ketidaksesuaian ini saja sudah menjadi kendala bagi pemerintah yang berdampak saat penyusunan anggaran. Angka yang di targetkan tidak sesuai dengan PMK terbit belakangan. Kemudian disusul dengan berbagai masalah lainnya seperti pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak dijalankan dengan maksimal oleh beberapa OPD yang mengakibatkan realisasi pajak daerah cenderung menurun setiap tahunnya, hal ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah Kota Pekanbaru maupun OPD yang bertugas menjadi pemungut pajak daerah agar mampu memaksimalkan dengan berbagai cara agar masyarakat patuh dalam membayar pajak. Sedangkan di sisi retribusi cenderung fluktuatif dan tertinggi di tahun 2017. Realisasi retribusi tergolong paling rendah karena hanya sekitar 20-35%.

Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Membantu Pemerintah Kota Pekanbaru Menilai Kinerja Keuangan Daerah

Rasio keuangan yang dihitung, digunakan sebagai alat ukur atau paramater dalam mengambil berbagai keputusan keuangan termasuk dalam pembuatan laporan APBD Kota Pekanbaru. Seperti yang diutarakan R2 selaku Kepala bidang akuntansi dan pelaporan. Dalam menilai kinerja keuangan, pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan banyak parameter untuk memutuskan rencana masa depan dan mengambil keputusan. Ada berbagai rasio yang digunakan seperti pengukuran derajat desentralisasi, analisis efektifitas, rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan berbagai rasio lainnya. Dan masyarakat juga bisa menghitung sendiri sebagai bahan perbandingan dan evaluasi bagi pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan dan didukung dengan hasil wawancara dengan R2 selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota Pekanbaru menggunakan rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan dan mengambil keputusan untuk rencana masa depan Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Kinerja keuangan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru cukup mandiri dalam membiayai ke pemerintahannya. Rasio efektifitas menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru dinilai kurang efisien mengelola keuangan dengan *trend* rasio hampir 100 persen. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan positif. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kota Pekanbaru dikategorikan positif. Rasio pertumbuhan belanja tak langsung Kota Pekanbaru dikategorikan negatif. Rasio pertumbuhan belanja langsung Kota Pekanbaru dikategorikan negatif. Rasio aktifitas belanja operasi Kota Pekanbaru menggambarkan bahwa pemerintah lebih fokus terhadap belanja rutin seperti belanja pegawai, barang dan jasa. Rasio aktifitas belanja modal menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru kurang memfokuskan kepada pengeluaran yang dilakukan pengadaan aset tetap berwujud dalam pemerintahan.

Penyebab tidak tercapainya realisasi anggaran Kota Pekanbaru adalah seperti PMK yang terlambat terbit sedangkan jadwal penyusunan laporan APBD sudah dimulai enam bulan sebelumnya, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian data yang diperoleh setelah penganggaran. Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dibagian pajak daerah dan retribusi daerah menjadi kategori yang paling besar tidak mencapai realisasi dan diakui oleh pemerintah Kota Pekanbaru dikarenakan OPD yang bertugas memungut pajak dan retribusi tidak maksimal. Sehingga selama tahun 2016-2018 persentase realisasi pajak daerah selalu menurun dan persentase retribusi daerah fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan dan digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dan rencana masa depan Kota Pekanbaru. Saat menilai kinerja Pekanbaru dengan rasio keuangan, Pemerintah Kota Pekanbaru mengakui mengalami beberapa kendala umum

dikarenakan fakta bahwa realiasi tidak tercapai membuat hasil perhitungan rasio tidak seperti yang diharapkan.

Peneliti hanya menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama 3 tahun saja, yaitu dari tahun 2016-2018. Hal ini disebabkan peneliti hanya mendapatkan dokumen tersebut secara lengkap dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dan penelitian ini dilaksanakan saat Pandemi Covid-19 maka dari itu peneliti hanya dapat mewawancarai 2 responden karena dirasa cukup dan keadaan tidak memungkinkan untuk mewawancarai semua bidang.

Saran untuk peneliti selanjutnya lebih baik menggunakan Laporan Realisasi anggaran (LRA) selama minimal 5 tahun terakhir, agar data yang dihitung lebih mendekati hasil yang diinginkan. Peneliti selanjutnya lebih baik mewawancarai responden dari keempat bidang agar hasil yang diperoleh dapat lebih akurat..

DAFTAR PUSTAKA

- Agrari Petompo, D; Untu, V. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2016. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi Di Sumatera. *E-Journal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*.
- Halim, A; Abdullah, S. (2010). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. K. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Lupia, A; Mccubins, M. (2000). Representation Or Abdication? How Citizens Use Institutions To Help Delegation Succeed. *European Journal Of Political Research*, 291–307.
- Mahmudi. (2010). *Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, Dan Politik*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Miles; Hubberman. (1994). *Qualitative Data Analysis* (S. Publisher (ed.)).
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi*, 83.